



Sosialisasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Labuan Lelea Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala

*Jamaluddin, Haryono Pasang Kamase, Tenripada

Accounting Department, Faculty of Economic and Business, Tadulako University.
Jl. Soekarno Hatta Km 9, Palu, Indonesia. 94118

*Corresponding Author e-mail: jamaluddin.akuntad@gmail.com

Diterima: September 2024; Direvisi: Oktober 2024; Diterbitkan: November 2024

Abstrak

Program pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan kapasitas pengelolaan dan pengawasan keuangan desa di Desa Labuan Lelea, Kabupaten Donggala. Kegiatan melibatkan 15 peserta, termasuk aparat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat. Program dilaksanakan dalam tiga tahap: persiapan melalui observasi dan wawancara, sosialisasi komprehensif teknik pengawasan keuangan, serta evaluasi. Dengan pendekatan interaktif dan partisipatif, pelatihan difokuskan pada proses perencanaan, penganggaran, implementasi, dan pertanggungjawaban. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap pengawasan keuangan, dengan skor pemahaman meningkat dari 60% menjadi 80%. Pembahasan menyoroti pentingnya pengawasan partisipatif yang melibatkan BPD dan masyarakat untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Rekomendasi mencakup pelatihan lanjutan untuk memperkuat keterampilan pengawasan keuangan serta perluasan model ke desa lain untuk memperbaiki tata kelola. Program ini memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan desa berkelanjutan melalui pengelolaan keuangan yang efektif.

Kata Kunci: Pengawasan Keuangan, Desa Labuan Lelea, Akuntabilitas.

Socialization on Village Financial Management Supervision in Labuan Lelea Village, Labuan Subdistrict, Donggala Regency

Abstract

This community service program aimed to enhance the capacity of village financial management and supervision in Labuan Lelea Village, Donggala Regency. The activities involved 15 participants, including village officials, Village Consultative Body (BPD) members, and community leaders. The program was conducted in three stages: preparation through observation and interviews, comprehensive socialization of financial supervision techniques, and evaluation. Using an interactive and participatory approach, the training focused on planning, budgeting, implementation, and accountability processes. The results showed increased participant understanding of financial supervision, with comprehension scores rising from 60% to 80%. Discussion highlighted the importance of participatory oversight involving both BPD and the community to enhance accountability and transparency in financial management. Recommendations include further training to strengthen financial supervision skills and expanding the model to other villages for improved governance. This program significantly contributes to sustainable village development through effective financial management.

Keywords: Financial Supervision, Labuan Lelea Village, Accountability

How to Cite: Jamaluddin, J., Kamase, H. P., & Tenripada, T. (2024). Sosialisasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Labuan Lelea Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala. *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 6(4), 902-909. <https://doi.org/10.36312/sasambo.v6i4.2265>



<https://doi.org/10.36312/sasambo.v6i4.2265>

Copyright© 2024, Jamaluddin et al

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) License.



PENDAHULUAN

Sejak tahun 2015, setiap desa di Indonesia telah memperoleh pendanaan berupa Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari pemerintah daerah dan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN. Pemberian pendanaan ini merupakan implementasi dari desentralisasi fiskal tingkat desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Berdasarkan Undang-Undang tersebut pemerintah desa diberi kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri memanfaatkan pendanaan ini, termasuk Desa Labuan Lelea. Melalui pendanaan ini, pemerintah desa Labuan Lelea dapat menjadikan stimulus pembangunan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa sarana dan prasarana yang sedang dibangun saat ini untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat diantaranya adalah pembangunan tambatan perahu dan pelabuhan sayur. Pendanaan desa ini diharapkan mampu meningkatkan pembangunan, memberdayakan masyarakat, dan mengurangi kemiskinan (Sebayang, 2023). Selain itu, pendanaan desa juga memiliki peran penting dalam menstimulasi pembangunan ekonomi lokal dengan memungkinkan pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat (Imam & Januari, 2022).

Berdasarkan hasil observasi tim pengabdian kepada pihak aparat Desa Labuan Lelea, ditemukan beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban. Diantaranya adalah masih kurangnya kemampuan responsif dan adaptif terhadap perubahan regulasi yang dinamis, profesionalitas dan integritas aparat desa dari segi kapasitas serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Kepala Desa Labuan Lelea, Bapak Zahrin, menjelaskan bahwa kompetensi aparatur desa saat ini masih kurang dalam memahami pengelolaan keuangan. Akibatnya, risiko terjadinya penyimpangan penganggaran semakin tinggi. Oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam pengawasan diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ADD dan DD, serta memastikan proses penganggaran sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan temuan penelitian Cahyadie (2023), yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan keuangan desa dapat mengarahkan penggunaan dana desa ke arah yang lebih efektif dan tepat sasaran. Berbagai pelatihan dan bimbingan teknis yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Donggala telah dilakukan, pemahaman dan kemampuan aparat desa dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan keuangan masih perlu ditingkatkan. Situasi ini menciptakan tantangan tersendiri dalam memastikan pengelolaan keuangan desa yang efektif dan akuntabel. Urgensi pengabdian ini terlihat dari kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan di desa, serta memperkuat partisipasi masyarakat dan BPD dalam pengawasan dana desa. Selain itu, peran inklusi keuangan dalam pembangunan pedesaan sangat diperlukan. Inklusi keuangan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan, yang merupakan tujuan fundamental SDGs (Ratnawati, 2020).

Rendahnya kemampuan aparatur desa untuk merespons perubahan regulasi keuangan serta minimnya keterlibatan aktif Masyarakat dalam

proses pengawasan. Program pengabdian ini bertujuan untuk menawarkan solusi yang inovatif melalui sosialisasi teknik pengawasan keuangan yang melibatkan para pemangku kepentingan yaitu aparat desa, BPD dan tokoh Masyarakat yang ada di Desa Labuan Lelea. Keterlibatan pemangku kepentingan secara aktif, diharapkan pengawasan keuangan desa dapat dilakukan secara partisipatif dan transparan, sehingga dapat meminimalisir risiko penyimpangan proses penganggaran dan meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh aparat desa. Kesale et al. (2022), yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa yang baik memerlukan partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan mengevaluasi setiap tahap pelaksanaan kegiatan. Pengawasan partisipatif dapat menciptakan hubungan yang erat antara masyarakat dan pemerintah desa, sehingga masyarakat merasa memiliki peran dalam menentukan arah pembangunan desa. Pengawasan keuangan desa tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat desa, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat untuk memastikan bahwa proses penganggaran dan pelaksanaannya digunakan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebaruan dari program pengabdian ini terletak pada pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemangku kepentingan langsung, termasuk BPD dan tokoh masyarakat, dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa. Melalui sosialisasi teknik pengawasan ini, diharapkan terjadi peningkatan kompetensi aparat desa dalam memahami regulasi dan tata kelola keuangan yang baik. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan desa sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan dana desa (Budiarto & Zulaika, 2022).

Tujuan dari program pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kompetensi pengelolaan dan pengawasan keuangan desa melalui sosialisasi komprehensif kepada pihak yang berkepentingan. Pengabdian ini juga mendorong partisipasi masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses pengawasan untuk memperkuat akuntabilitas. Sosialisasi ini diharapkan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang pentingnya kolaborasi antara aparat desa, BPD, dan Masyarakat dalam menciptakan tata kelola keuangan desa yang lebih baik. Artikel ini dapat memberikan kontribusi dalam dua aspek itu yaitu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang tata kelola keuangan desa dengan menekankan pentingnya pengawasan. Artikel ini mendukung pencapaian beberapa tujuan SDGs, terutama tujuan 8 yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, dan tujuan 16 yaitu perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat. Dengan memperbaiki pengelolaan keuangan desa, penggunaan dana desa dapat lebih efektif dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal dan mengurangi ketimpangan. Pengawasan yang lebih baik juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa, yang merupakan bagian dari pencapaian SDGs terkait tata kelola yang baik.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pengabdian ini melalui tiga (3) tahapan sebagai berikut:

1. Observasi dan Wawancara (Persiapan)

Tahap ini dilakukan pada akhir bulan Februari 2024. Tim pengabdian melaksanakan observasi dan wawancara kepada pihak stakeholder, yakni Kepala Desa dan Bendahara Desa Labuan Lelea, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memahami kondisi pengawasan keuangan desa secara komprehensif, yaitu masalah yang dihadapi, kapabilitas aparatur desa, pemahaman anggota BPD.

Observasi dan wawancara dilakukan untuk memperoleh data dan informasi secara mendalam terkait permasalahan pengelolaan dan pengawasan keuangan desa. Penggunaan wawancara membantu dalam menggali wawasan para stakeholder mengenai persepsi dan tingkat pemahaman mereka terhadap pengawasan keuangan desa. Selain itu, kegiatan ini juga dapat mengidentifikasi kendala dan potensi yang dihadapi desa, sehingga penyusunan materi sosialisasi dapat lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan. Observasi memberikan gambaran nyata mengenai tata kelola keuangan yang sedang berjalan di desa, termasuk sistem pelaporan dan pelaksanaan pengawasan oleh aparatur desa.

2. Pelaksanaan Sosialisasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan

Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan pada bulan Juli 2024. Sosialisasi ini difokuskan pada teknik pengawasan pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, penganggaran, implementasi dan penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban dan evaluasi. Pelaksanaan sosialisasi pengawasan pengelolaan keuangan meliputi:

- a. Metode Sosialisasi: Metode yang digunakan dalam sosialisasi ini adalah interaktif dan partisipatif. Pada kegiatan sosialisasi ini pengabdian mengundang aparat desa, ketua dan anggota BPD, dan tokoh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembahasan mengenai konsep pengawasan, peran masing-masing stakeholder, dan teknik pengawasan yang dapat diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa.
- b. Materi Sosialisasi: Materi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi meliputi:
 1. Konsep Pengawasan Keuangan Desa: Menjelaskan tentang pentingnya pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa untuk mencegah terjadinya kesalahan prosedur dan penyimpangan anggaran. Materi ini juga mencakup berbagai prinsip dasar pengawasan, seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.
 2. Tahapan Pengawasan: Pembahasan mengenai setiap tahapan dalam pengelolaan keuangan desa yang membutuhkan pengawasan, mulai dari perencanaan, penganggaran, implementasi, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.
- c. Peran Mahasiswa sebagai pendamping: mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pengabdian ini sebanyak 2 orang. Mereka berperan dalam pembuatan spanduk, menyiapkan absensi, mendokumentasikan pelaksanaan sosialisasi, bertindak sebagai MC.

3. Evaluasi Hasil Sosialisasi dan Penyusunan Laporan

Pada tahap ini pengabdian melakukan evaluasi hasil sosialisasi dan Menyusun laporan kemajuan dan laporan akhir pengabdian. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai efektivitas kegiatan sosialisasi dan dampaknya terhadap peningkatan kompetensi peserta dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa. Evaluasi dilakukan dengan memberikan pertanyaan mengenai pengawasan. Jumlah pertanyaan disiapkan sebanyak 5 (lima) tentang pentingnya pengawasan, jenis pengawasan, siapa yang dapat melakukan pengawasan, tahapan pengawasan. Pada tahap ini juga pengabdian menyusun laporan kemajuan dan laporan akhir pengabdian, serta menyusun artikel untuk dipublikasikan.

HASIL DAN DISKUSI

Desa Labuan Lelea, yang terletak di Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, memiliki sejarah panjang dalam perkembangan pemerintahan desa. Desa ini secara resmi menjadi entitas mandiri dengan terbitnya Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri No.146.1/1330/POUD pada tanggal 15 Mei 1997, setelah melalui berbagai tahap pemekaran sejak 1991. Dengan pengakuan ini, pemerintah desa Labuan Lelea diakui secara resmi oleh pemerintah dan bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat secara mandiri.

Secara geografis, Desa Labuan Lelea memiliki posisi strategis dengan akses langsung ke laut, yang memberikan potensi besar dalam sektor perikanan dan kelautan. Sektor ekonomi desa ini didominasi oleh aktivitas pertanian dan perikanan. Sebagai desa pesisir, sebagian besar warga bergantung pada hasil laut seperti ikan, udang, dan produk laut lainnya. Selain itu, pertanian juga menjadi sumber penghidupan utama, dengan komoditas seperti padi, jagung, dan tanaman palawija. Keberadaan pasar tradisional dan Usaha Kecil Menengah (UKM) turut memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian desa. Desa Labuan Lelea memiliki potensi besar, terutama di sektor perikanan dan kelautan, serta sektor pertanian.

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi teknis pengawasan keuangan desa dilaksanakan pada 30 Juli 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh 15 peserta yang terdiri dari kepala desa, staf desa, ketua dan anggota BPD, dan tokoh masyarakat. Sosialisasi ini difokuskan pada teknis pengawasan pengelolaan keuangan yang meliputi tahap perencanaan, penganggaran, implementasi, dan penatausahaan. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi para pemangku kepentingan dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa, sehingga dapat menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Selama pelaksanaan sosialisasi, pengabdian memberikan pemahaman terkait konsep pengawasan keuangan desa, yang meliputi tujuan, objek, sifat, ruang lingkup, metode, dan pelaksana pengawasan. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa anggaran desa dikelola sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, pengawasan mencakup penerimaan dan pengeluaran desa, termasuk penerimaan pajak, retribusi, dan belanja rutin serta belanja pembangunan.

Pengawasan dibagi menjadi dua jenis, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan detektif. Pengawasan preventif dilakukan sebelum aktivitas atau kegiatan dimulai untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Sementara itu, pengawasan detektif dilakukan dengan meneliti dan memeriksa dokumen-dokumen pertanggungjawaban bendaharawan. Aktivitas pengawasan ini meliputi perbandingan antara apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Dalam kegiatan sosialisasi, pengabdian juga menyampaikan pentingnya pengawasan dilakukan pada setiap tahapan pengelolaan keuangan desa, yaitu tahap perencanaan, penganggaran, implementasi, dan pertanggungjawaban.

Materi yang disampaikan oleh pengabdian mencakup tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa yang memerlukan pengawasan, yaitu tahap perencanaan-penganggaran, implementasi, dan tahap pelaporan serta pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan dan penganggaran, pengawasan dilakukan dengan memantau proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), dan Rancangan APBDes. Di tahap implementasi, pengawasan melibatkan pemantauan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan APBDes, analisis terhadap dokumen, dan verifikasi bahwa kegiatan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan dilakukan dengan telaah terhadap substansi laporan serta memastikan akuntabilitas dan responsibilitas.



Gambar 1. Penyampaian materi

Pelaksanaan sosialisasi ini telah berhasil meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan tentang pentingnya pengawasan keuangan desa yang komprehensif. Melalui pendekatan partisipatif, kegiatan ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks Desa Labuan Lelea, pelibatan masyarakat dan BPD dalam pengawasan diharapkan dapat menjadi model pengawasan yang lebih efektif. Selain itu, kegiatan ini menekankan pentingnya pengawasan di setiap tahap pengelolaan keuangan desa, mulai tahap perencanaan, implementasi, maupun pertanggungjawaban. Hal ini sejalan dengan hubungan pengetahuan keuangan terhadap partisipasi Masyarakat yang

dimoderasi oleh pengendalian internal (Nazaruddin et al., 2023). Pemerintah desa dapat meningkatkan pengawasan dan transparansi agar masyarakat percaya bahwa dana desa digunakan dengan tepat (Budiarto & Zulaika, 2022). Kesale et al. (2022), yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa yang baik memerlukan partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan mengevaluasi setiap tahap pelaksanaan kegiatan.

KESIMPULAN

Sosialisasi pengawasan keuangan desa di Desa Labuan Lelea, Kabupaten Donggala, dihadiri oleh kepala desa, aparat desa, BPD, dan masyarakat sebanyak 15 orang. Materi meliputi pentingnya pengawasan, jenis-jenisnya, pihak yang berwenang, serta tahapan pengawasan, yaitu perencanaan, implementasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta dari 60% menjadi 80%. Dialog dan partisipasi aktif selama kegiatan mendukung keberhasilan sosialisasi ini. Pemahaman yang meningkat mendorong keterlibatan masyarakat dan pihak berwenang dalam pengawasan, yang berkontribusi pada akuntabilitas pemerintah desa dan meminimalkan risiko penyimpangan dana. Kegiatan ini juga menekankan pentingnya pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan BPD secara aktif. Model pengawasan ini dapat diterapkan di desa lain untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang efektif dan transparan. Namun, pelatihan lanjutan diperlukan agar kompetensi pengawasan terus berkembang dan mendukung pembangunan desa yang inklusif, akuntabel, dan berkelanjutan.

REKOMENDASI

Bentuk pengabdian yang kami rekomendasikan berupa pelatihan pengawasan dan pengelolaan asset desa. Mengikutkan ketua atau anggota BPD dalam kegiatan peningkatan peran pengawasan. Pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk peningkatan kompetensi pengawasan. Hambatan yang dihadapi yaitu pengabdian tidak dapat melakukan pelatihan pengawasan secara mendalam karena minimnya pendanaan.

ACKNOWLEDGMENT

Kegiatan pengabdian ini tidak akan terlaksana tanpa dukungan berbagai pihak. Kami menyampaikan terima kasih kepada Prof. Dr. Ir. Amar ST., MT., IPU., ASEAN Eng, Rektor Universitas Tadulako, serta Dr. Lukman M.Hum, Kepala LPM, yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan pengabdian ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Dr. Muhammad Iqbal, SE., M.Si., Ak, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Dr. Muhammad Din, SE., M.Si., Ak, Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, atas alokasi dana yang mendukung kegiatan ini. Penghargaan khusus kami berikan kepada Bapak Zahrin, Kepala Desa Labuan Lelea, yang telah bersedia menjadi tuan rumah. Semua dukungan ini sangat berarti dalam menyukseskan kegiatan ini.

REFERENCES

Baswir, BPS Kabupaten Donggala, 2023. <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/01/Pedoman-PKD-2021.-6-7-januari.pdf>

- BPS Kabupaten Donggala, 2023. <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/01/Pedoman-PKD-2021.-6-7-januari.pdf>
- Budiarto, D. and Zulaika, I. (2022). Which one is more important: internal control system or financial report accessibility?. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 14(3),162-172. <https://doi.org/10.33508/jako.v14i3.3731>
- Cahyadie, B. (2023). Distribution analysis and ranking analysis of poverty data from three data sources in bekasi regency. *Jurnal Bina Praja*, 15(3), 453-466. <https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.453-466>
- Imam, M. and Januari, A. (2022). Village funds and resilience in rural areas: evidence from Indonesia post-covid pandemic. *Journal of Economics Finance and Management Studies*, 05(10), 2995-3001. <https://doi.org/10.47191/jefms/v5-i10-20>
- Kesale, A., Mahonge, C., & Muhanga, M. (2022). Effects of decentralization on the functionality of health facility governing committees in lower and middle-income countries: a systematic literature review. *Global Health Action*, 15(1). <https://doi.org/10.1080/16549716.2022.2074662>
- Nazaruddin, I., Nirmala, N., Az-Zahro, S., & I, I. (2023). The mediation role of internal control implementation in village financial accountability performance. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 15(1), 67-75. <https://doi.org/10.23969/jrak.v15i1.6431>
- Ratnawati, Kusuma (2020). The Impact of Financial, Inclusion of Economic Growth, Poverty, Income, Inequality, and Financial Stability in Asia. *Journal of Asean Finance, Economics and Business*. Vol.7 (10), 73-85. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no10.073>
- Republik Indonesia (2014) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa. Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia.
- Sebayang, V. (2023). Impacts of village funds share on village development index in bogor regency, indonesia. *International Journal of Research and Review*, 10(8), 869-879. <https://doi.org/10.52403/ijrr.202308111>
- Shaleh, K., Subing, H., & Yustina, A. (2020). Village financial management: based on local tradition. *Ijbe (Integrated Journal of Business and Economics)*, 4(1), 23. <https://doi.org/10.33019/ijbe.v4i1.245>
- Zhou, H., Zhang, W., Zhang, S., Wang, F., Zhong, Y., Gu, L., ... & Tian, D. (2015). Health providers' perspectives on delivering public health services under the contract service policy in rural china: evidence from xinjian county. *BMC Health Services Research*, 15(1). <https://doi.org/10.1186/s12913-015-0739-x>
- <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/01/Pedoman-PKD-2021.-6-7-januari.pdf>
- <https://profil-desalabuanlelea2014.blogspot.com/2015/11/profil-desalabuan-lelea-2014.html> Download tanggal 12 Agustus 2024.